



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 820 / 259 / POL PP

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan struktur dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik yang ada di lingkungannya;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya ;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
 - f. Melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Menugaskan PPID Pelaksana dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA- SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya.
Pada tanggal 07 Mei 2024



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

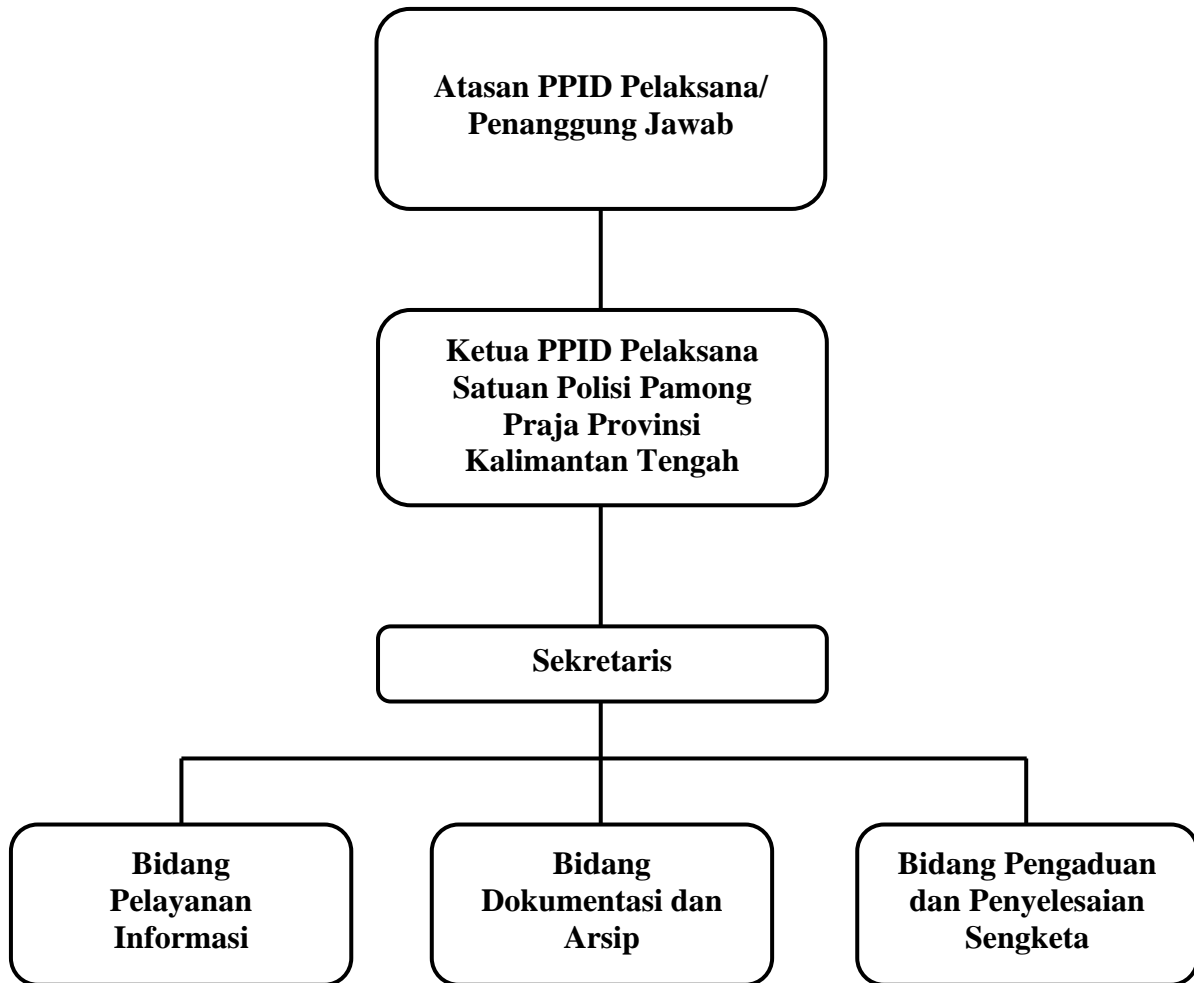
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
Up. Kepala Biro Hukum di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 820/259/POL PP
TANGGAL : 07 Mei 2024**

STRUKTUR ORGANISASI PLID



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 820/259/POL PP
 TANGGAL : 7 Mei 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / UNIT KERJA
I.	Atasan PPID PELAKSANA	BARU, S.Pd., M.Si.
II.	PPID PELAKSANA a. Ketua b. Sekretaris	HARI WIBOWO THOMAS, SH. LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
III.	1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kordinator : MIKELSON DAMEK, ST., MT. Anggota : 1. WIDYO KRISWAHJONO, SE. 2. TITIEK MARYANI, SH. 3. INGE MAWARNY, SE 4. YERI, A.Md. 5. SYLVIA ARIANTY 6. TIMOTIUS DEHEN L. DJUNGAN
	2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kordinator : ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos.,M.Si Anggota : 1. DEDI SETIADI, SE 2. SEPTIDYA KHAIRUNISA P, S.IP., M.A.P 3. SISKI, SE 4. ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH. 5. I KETUT SUTAWAN, SE. 6. ELZA YOLANDA DIANASARI, A.Md. 7. HENGKY PRANAJAYA
	3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kordinator : SUPARDI, S.Sos.,M.A.P Anggota : 1. NELLYANA, S.STP., M.Si. 2. DANIEL, S.Kom. 3. MUHAMAD HUMAINY, SH. 4. YOSSI MARIA M. HUTAJULU, SE. 5. SATELIT, S.Sos. 6. ANITA RAHMAN, SE. 7. CHELSI NATASYA NARANG, S.Psi.



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007